



## Cerminan Politik Zaman Nabi Muhammad SAW pada Abad-21

Hisny Fajrussalam<sup>1</sup>, Fani Nurfalalah<sup>2</sup>, Fatiyah Qailani<sup>3</sup>, Feli Anissa<sup>4</sup>, Kurnia Sary<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta

### Abstract

Received: 07 Agustus 2024  
Revised: 12 Agustus 2024  
Accepted: 22 Agustus 2024

Artikel ini merupakan suatu studi kasus pemikiran politik Islam dan mendeskripsikan perjalanan Nabi Muhammad SAW di Makkah-Madinah dari perspektif politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tokoh yang diakui sebagai pencipta pilar pada peradaban manusia. Terutama pada umat Islam, Ia membuat sistem politik ke arah yang modern. Objek pada kajian ini adalah peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara di Madinah dan Ia mengayomi warga heterogen. Dari hasil artikel yang telah dikaji akan memberikan informasi untuk menambah ilmu terkait politik pada abad-21 dengan cerminan politik Nabi Muhammad SAW.

**Keywords:** Politik Islam, Nabi Muhammad SAW, Abad-21, Kebijakan.

(\*) Corresponding Author: [hfajrussalam@upi.edu](mailto:hfajrussalam@upi.edu)<sup>1</sup>, [faninfalah@upi.edu](mailto:faninfalah@upi.edu)<sup>2</sup>, [fatiyahqailani@upi.edu](mailto:fatiyahqailani@upi.edu)<sup>3</sup>, [feli anissa@upi.edu](mailto:feli anissa@upi.edu)<sup>4</sup>, [kurniasary@upi.edu](mailto:kurniasary@upi.edu)<sup>5</sup>

**How to Cite:** Fajrussalam, H., Nurfalalah, F., Qailani, F., Anissa, F., & Sary, K. (2024). Cerminan Politik Zaman Nabi Muhammad SAW pada Abad-21. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 422-428. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13789056>

## PENDAHULUAN

Kehidupan akan terus maju dan berkembang, salah satunya konteks politik. Politik tidak selamanya tetap sama dari zaman ke zaman. Pada abad ke-21 ini politik yang digunakan sudah berkembang dengan aturan-aturan yang baru, hal tersebut jika dipandang dari sudut agama maka haruslah ada kaitannya dengan zaman sebelumnya. Bagi umat islam, dalam segala aspek di kehidupan haruslah ada cerminan dari zaman Rasulullah.

Hakikat politik berdasarkan Isjwara (1964) ialah distribusi serta kontrol kekuasaan (power). sehingga dengan adanya proses politik, maka terjadi rentetan insiden yang berhubungan satu sama lain berdasarkan atas kekuasaan. Dalam islam, politik memiliki makna lain yaitu secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islami (khalifah) dan kewajiban menjalankan Syariah Islam (Hukum Islam).

Kebijakan politik Nabi Muhammad SAW pada masanya dapat dikaji dan dianalisis relevansinya dengan masa kini atau pada abad ke-21. Selama berada di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat yang adil dan inklusif yang berlandaskan prinsip kebebasan, nasionalisme, serta pemberdayaan sosial, politik, dan hukum. Nabi Muhammad SAW mendirikan "Konstitusi Madinah", yang dianggap sebagai deklarasi politik yang menjelaskan mengenai etika dan tanggung jawab masyarakat. Konstitusi Madinah juga dikenal sebagai "Piagam Madinah", yang merupakan dokumen yang menetapkan hak dan tanggung jawab komunitas Muslim dan nonMuslim di Madinah. Kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat majemuk yang menghormati hak-hak setiap individu, apapun agama atau sukunya tanpa memandang perbedaan.

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW juga ditandai dengan keterbukaannya terhadap kritik dan kesediaannya mendengarkan pendapat dan saran orang lain.

Penerapan sistem politik zaman Nabi Muhammad SAW yang diterapkan pada abad ke-21 memiliki berbagai aspek yang dapat dilihat. Terdapat beberapa prinsip dan praktik utama pada masa Nabi Muhammad SAW yang masih relevan hingga saat ini yaitu membangun kekuatan politik baru, prinsip kesetaraan, kepemimpinan yang demokratis, menghormati kebebasan beragama, keadilan dan solidaritas. Prinsip dan praktik tersebut sebagai panduan dalam penerapan sistem politik islam yang adil dan inklusif di abad ke-21. Dalam hal tersebut kesetaraan, demokrasi, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama menjadi sangat perlu bagi masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Pada penelitian terdahulu di dalam sejarah politik islam, kepemimpinan Rasulullah SAW di madinah yang menuntun warga yang menjadi arti penting pada eksistensi negara dan pemerintahan di dalam islam. Kepemimpinan pada Rasul di Madinah menjadi bukti bagi terpenuhinya syarat nominal untuk disebut sebagai suatu “negara”. Pada beberapa unsur penting bagi terbentuknya kota Madinah, dapat dikemukakan, terdiri dari adanya wilayah, yaitu Madinah; rakyat yang terdiri dari golongan-golongan Muslim dan non-Muslim; pemerintahan dikendalikan oleh Nabi saw teoritis politik Islam yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah al-Mu'tashim (833-842 M) era Dinasti Abbasiyah.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik di abad-21 ini jika mencerminkan dengan apa yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hal demikian karena di zaman sekarang ini politik semakin berkembang dan banyak masyarakat mulai melupakan apa yang ada pada zaman Rasulullah. Karena pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan pada sejak dini pada setiap individu. Walau bagaimana pun, selain tingkat pendidikan, moral individu juga menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu pembangunan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun studi kasus dipilih karena bertujuan untuk melakukan analisis agar mengetahui penerapan politik di zaman Nabi Muhammad SAW di abad-21 dengan variabel yang diamati yaitu politik di zaman Nabi Muhammad SAW yang dijadikan cerminan politik di abad-21. Politik zaman Nabi Muhammad SAW yang dianalisis pada penelitian ini meliputi identitas politik islam, kebijakan politik islam dan perbedaan kebijakan politik islam yang dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa kini (abad-21), serta penerapan politik islam yang masih relevan di abad-21

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identitas Politik Islam**

Pada awal kemunculannya, identitas politik islam disebut dengan Janji Aqaba (Ikrar Akaba). Janji ini membuat islam memiliki kekuatan terutama pada kaum Muslim yang tinggal di Mekkah. Karena pada masa itu, kaum quraisy terkenal kejam, sehingga dakwah islam dapat memasuki pintu hati penduduk Madinah. Setelah penduduk madinah memasuki islam, mereka mengirim

perwakilan untuk menghasilkan sebuah perjanjian yang berbunyi: “*Demi*

*Allah, kami akan membela Engkau ya Rasul, seperti halnya kami membela istri dan anak-anak kami sendiri. Sesungguhnya kami adalah putra-putra pahlawan yang selalu siap mempergunakan senjata.”.* Setelah selesai membuat janji tersebut, Rasulullah membentuk pemimpin/perwira dari 12 orang yang terpilih. Hal tersebut merupakan langkah awal dimana politik Islam membentuk kekuatannya di luar Makkah, setelah beberapa hari, Rasul dan para sahabatnya hijrah ke Yastrib. Dengan demikian, secara resmi para petinggi komunitas Muslim awal terbentuk. Komunitas ini memiliki kekuatan dalam bidang politik, ekonomi dan juga fisik.

### **Kebijakan Politik Zaman Nabi Muhammad SAW**

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, politik sudah dibagi kedalam 2 fase. Yaitu fase Makkah dan juga fase Madinah, pada kebijakan politik zaman Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan persaudaraan internal kaum muslimin (al - ukhuwah al - Islamiyah) merupakan antara sahabat Muhajirin dan Anshar, adapun perjanjian eksternal antara muslim dan non - muslim (al - ukhuwah al - insaniyah). Adapun kebijakan politik pada zaman Nabi Muhammad SAW yaitu :

1. Membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utama. Langkah utama tersebut untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj yang baru berdamai, fungsi utama pembangunan masjid yaitu sebagai ruang ibadah namun dapat menjadi ruang publik dalam memecahkan masalah keumatan.
2. Menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan yang tidak memiliki pertalian darah. Kebijakan ini bertujuan untuk menanamkan sikap ukhuwah Islamiyah dan membentuk sebuah ikatan baru berlandaskan iman, persaudaraan dan juga gotong royong.
3. Membuat nota kesepakatan yang bertujuan untuk hidup bersama dengan masyarakat lain. Dalam memimpin Nabi Muhammad bermusyawarah dengan masyarakat Madinah yang perjanjiannya disebut dengan Piagam Madinah, perjanjian tersebut untuk saling mendukung, menghargai, bekerja sama dan mewujudkan kehidupan yang damai dalam membela kota Madinah.
4. Membentuk angkatan perang dalam menghadapi ancaman invasi dari kafir Quraisy Makkah.

Menurut Syam, M. B. (2015) dalam menjalankan pemerintahan Nabi Muhammad SAW juga menerapkan prinsip-prinsip ketata negaraan yang dijadikan sebagai contoh bagi pemerintahan oleh negara modern. Prinsip -prinsip tersebut antara lain ialah.

#### **1. Musyawarah**

Salah satu hal yang dijadikan sebagai dasar dalam pemerintahan yang menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis adalah musyawarah. Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara di Madinah merupakan hasil dari kesepakatan yang dilakukan oleh penduduk yang ada di Madinah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari musyawarah.

Dalam mengambil kebijakan politik Nabi Muhammad SAW selalu melakukan pertimbangan bersama dengan penduduk Madinah. Dengan melakukan kegiatan musyawarah bersama secara terbuka yang senantiasa dilakukan untuk kepentingan bersama agar bisa menjalankan negara dengan baik. Selain itu, musyawarah merupakan salah satu hal perintah Allah SWT, hal ini berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang dijadikan sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat

serta dalam kehidupan bernegara.

### **Adanya Persamaan**

Pada sistem perundang-undangan serta politik pada pemerintahan di zaman Nabi Muhammad SAW adanya persamaan merupakan salah satu hal yang penting. Seluruh penduduk di Madinah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam, Namun Nabi Muhammad SAW selalu memposisikan bahwa dirinya memiliki kedudukan yang sama atau setara dengan seluruh orang yang turut serta menjalankan pemerintahan di Madinah. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW didasarkan kepada petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11.

Dalam menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis prinsip persamaan harus diterapkan dengan konsisten. Walaupun pada dasarnya pemimpin memiliki kedudukan yang terhormat hal itu tidak membuatnya menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan masyarakat biasa. Penerapan prinsip adanya persamaan harus diterapkan dalam pelayanan publik, pada pelaksanaan hukum, serta memberikan hak-hak yang sesuai pada penduduk dengan standar yang adil. Dengan menerapkan persamaan pada sistem pemerintahan bisa mencegah adanya nepotisme.

### **Menerapkan Keadilan**

Dalam menjalankan pemerintahan masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menerapkan keadilan. Pada sistem perundang-undangan keadilan merupakan aspek yang memiliki posisi tertinggi. Nabi Muhammad SAW turut memerintahkan agar masyarakat terutama umat muslim untuk selalu menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat agar bisa menghindari perilaku zalim.

### **Kebebasan**

Sistem pemerintahan yang ideal dan baik ialah mampu memberikan kebebasan pada penduduk di mana semua orang memiliki kebebasan untuk menjalani hidup tanpa adanya tekanan dari orang lain, memiliki kebebasan untuk berfikir dan memberikan pendapat dan memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan.

### **Adanya Wewenang dan Tanggung Jawab**

Pada sistem pemerintahan demokrasi pemimpin memiliki pertanggungjawaban kepada penduduk. Nabi Muhammad SAW pun berkata bahwa semua pemimpin harus bisa mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Selain bertanggung jawab kepada masyarakat, pemimpin juga bertanggung kepada Allah berdasarkan syari'atnya. Sedangkan menurut ajaran Islam wewenang seorang pemimpin harus dipatuhi ketika menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan Allah SWT.

### **Kebijakan Politik Abad-21**

Penerapan sistem politik zaman Nabi Muhammad SAW yang diterapkan pada abad ke-21 memiliki berbagai aspek yang dapat diketahui dan dikembangkan. Adapun prinsip dan praktik utama pada masa Nabi Muhammad SAW yang masih relevan pada abad 21 yaitu:

### **Membangun kekuatan politik baru**

Pada masa Nabi Muhammad SAW, telah berdirinya kekuatan politik baru yang merupakan negara Islam. Hal ini dapat dilihat sebagai tindakan politik yang signifikan dalam masa islam saat itu.

### **Prinsip kesetaraan**

Prinsip kesetaraan menjadi salah satu hal yang penting dalam sistem politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Di negara Madinah kedudukan Nabi Muhammad SAW tidak akan hukum, dan setiap umat pada saat itu akan tunduk terhadap peraturan dan ketentuan yang sama.

### **Kepemimpinan demokratis**

Kepemimpinan pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki ciri selalu menerima terhadap kritik umatnya dan mendengarkan pendapat serta saran dari umatnya. Hal tersebut dapat diketahui sebagai cerminan gaya kepemimpinan yang demokratis.

### **Menghormati kebebasan beragama**

Nabi Muhammad SAW di negara Islam Madinah sangat menghormati kebebasan untuk beragama kepada umatnya dan tidak memaksakan Islam pada umatnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai cerminan negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan tidak melarang umat beragama yang berbeda untuk mengamalkan keyakinan masing-masing individu.

### **Keadilan dan solidaritas**

Salah satu hal penting yaitu mengenai prinsip keadilan, solidaritas, dan dukungan terhadap rakyat dalam sistem politik pada masa itu. Negara Madinah muncul sebagai negara yang sederhana dan memilih aspek pemerintahan terbaik untuk melayani rakyatnya.

## **Perbedaan Kebijakan Politik pada Zaman Nabi dengan Abad-21**

Perbedaan kebijakan politik Islam pada zaman Nabi Muhammad dengan abad-21:

### **1. Zaman Nabi Muhammad**

- Pada masa Nabi Muhammad, politik Islam merupakan sintesis dan amalgamasi dari konsep-konsep kepemimpinan yang dikenal dalam masyarakat Arab pra-Islam.
- Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin membangun suatu kekuatan politik baru, yang pada masa itu berhasil menyatukan suku-suku Arab di Jazirah Arab.
- Pemerintahan Nabi Muhammad lebih bercorak demokratis jika dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang ada pada zaman modern.
- Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara.
- Kebijakan politik Nabi Muhammad SAW didasarkan pada misi kenabiannya dan perintah Al-Qur'an.

### **2. Abad-21**

- Pemisahan antara politik dan agama menjadi salah satu perbedaan utama antara kebijakan politik Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa kini.
- Pada masa kini, politik Islam seringkali dianggap sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam, bukan politik yang berlandaskan pada ajaran agama Islam.

- Kebijakan politik Islam pada masa kini cenderung dipengaruhi oleh konteks sosial,
- politik, dan ekonomi yang berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW.
- Pemimpin negara pada masa kini tidak memiliki otoritas yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pemimpin agama, kepala negara, panglima militer, hakim agung, dan pembentuk hukum.
- Pada masa kini, politik Islam seringkali terkait dengan isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan umat manusia.

### **Cara Penerapan Politik Zaman Nabi di Abad-21**

Menurut al-Faruqi (1984: VII), umat islam perlu mengintegrasikan aspek kemodernan dan keislaman dengan menguasai semua disiplin modern sebagai prasyarat utama. Setelah itu mereka harus mengintegrasikan seluruh pengetahuan itu ke dalam kebutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali dan akomodasi terhadap berbagai komponennya sebagai *word view* Islam dan menetapkan nilai-nilainya.

Politik Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dapat diterapkan dalam konteks masa kini (abad-21) dengan memperhatikan beberapa prinsip dan strategi yang digunakan oleh Nabi dalam membangun masyarakat Madinah. Berikut adalah beberapa cara penerapan politik Islam zaman Nabi Muhammad SAW di masa kini (abad-21):

#### **Komitmen terhadap pluralitas dan kemandirian masyarakat**

Paradigma masyarakat madani yang dikembangkan oleh Nabi memiliki komitmen tinggi terhadap pluralitas dan kemandirian masyarakat. Dalam konteks masa kini, hal ini dapat diwujudkan dengan menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, serta memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah yang dihadapi.

#### **Membangun persaudaraan internal umat Muslim**

Politik islam yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan persaudaraan internal kaum Muslimin. Di masa kini, hal ini dapat diwujudkan dengan memperkuat hubungan antarumat Muslim, mengatasi perpecahan dan konflik yang terjadi, serta saling mendukung dalam memajukan umat dan agama.

#### **Mengutamakan keadilan, inklusivisme, dan demokratisasi**

Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat madani yang bernuansa keadilan, inklusivisme, dan demokratisasi. Di masa kini, hal ini dapat diwujudkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam kebijakan publik, mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam pengambilan keputusan, dan memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi.

#### **Membentuk negara konstitusi**

Nabi Muhammad SAW juga berhasil membentuk negara konstitusi dengan meletakkan pondasi dan konstruksi masyarakat madani dalam dokumen yang dikenal sebagai 'Piagam Madinah' atau 'Konstitusi Madinah'. Di masa kini, hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan sistem hukum yang berlandaskan pada konstitusi, mengakui hak asasi manusia, dan menjamin kebebasan beragama dan berpendapat.

#### **Mengutamakan tanggung jawab warga dalam pembelaan negara**

Nabi Muhammad SAW menggariskan tanggung jawab warga dalam pembelaan negara dari ancaman musuh. Di masa kini, hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan kesadaran dan semangat bela negara, serta melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

**Mengedepankan keharusan moral dan politis untuk mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmahan**

Politik islam mengacu pada syara' dan mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmahan. Di masa kini, hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan kebijakan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan mengutamakan kepentingan umum.

**KESIMPULAN**

Muhammad SAW merupakan Rasul Allah, ia juga sebagai kepala negara. Kerasulan dimulai dari ia mengajak masyarakat Mekah untuk beriman kepada Allah, beribadah dan berakhlak mulia. Kemudian ia menjadi kepala negara di Madinah untuk menetapkan ekonomi negara terutama pada zakat dan jizyah, dan ia juga membangun angkatan bersenjata untuk melindungi masyarakat Madinah. Dalam menjalankan pemerintahan Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa prinsip yaitu musyawarah, persamaan, keadilan, kebebasan serta wewenang dan tanggung jawab.

**REFERENSI**

- Al-Faruqi, I. I. R., & Lubis, T. (1984). *Islamisasi Pengetahuan*. Pustaka.
- Amin, S. *Identitas Politik Islam Masa Nabi Muhammad dan Khulafa Al-Rasyidin* (Bachelor's thesis, Fakultas Adab dan Humaniora).
- Efrinaldi, E. (2019). *Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan*. Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(2).
- Hidayatulloh, H. (2018). *Politik Hukum Pemerintahan Islam Pasca Nabi Muhammad SAW*. Mizan: Journal of Islamic Law, 3(1).
- Isjwara, F. (1964). *Pengantar ilmu politik*. (No Title).
- Syam, M. B. (2015). *Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)*. Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan, 157-174.
- Thabrani, A. M. (2014). *Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 4(1).